

The Influence of Information Technology and Monitoring Systems on the Quality of Financial Reports at Bapenda Sumedang Regency

Ayi Srie Yuniawati¹, Maman Nurachman², Syarah Nur Fadilah³

^{1,2,3}Universitas Sebelas April

asyuniawati.feb@unsap.ac.id, maman.feb@unsap.ac.id, syarahnur.feb@unsap.ac.id

Article Info

Article history:

Received: Jan, 17 2025

Revised: Feb, 22 2025

Accepted: Apr, 27 2025

Keywords:

Information Technology (IT), Regional Financial Supervision, Quality of Financial Reports

ABSTRACT

The term "quality of financial reports" describes a well-organized document that provides information that is simple to understand and can be used as a foundation for future decision-making. It shows the financial condition, transactional activities, and financial performance of local governments. Reliability, understandability, comparability, and relevance are all requirements for a high-quality financial report. The purpose of this study is to investigate how Bapenda's financial reports are affected by regional financial supervision and information technology. 62 respondents were given questionnaires as part of the study, which was carried out at the Sumedang Regency's Regional Revenue Agency (Bapenda). In this study, a quantitative methodology was used. SPSS version 27 was used to process the data, which included descriptive statistical analysis, tests for validity and reliability, and traditional assumption testing, such as tests for heteroscedasticity, multicollinearity, and normality. Multiple linear regression analysis, t-tests, F-tests, and coefficient of determination tests were used to test the hypotheses. Information technology and financial oversight both have a favorable impact on the quality of financial reporting, according to the results of the partial test (t-test). Furthermore, the simultaneous test (F-test) showed that both factors work together to improve the caliber of financial reporting. These results imply that raising the caliber of local government financial reports is facilitated by advancements in financial supervision and information technology.



Copyright © 2025 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Ayi Srie Yuniawati,

Program Studi Akuntansi,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas April,

Jl. Angrek Situ No.19 Sumedang Utara, Sumedang.

Email: asyuniawati.feb@unsap.ac.id

1. Introduction

Dengan kemajuan teknologi, penggunaan teknologi informasi telah menjadi komponen penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Pengolahan data, penyusunan laporan, dan pemantauan anggaran secara real-time memungkinkan pembuatan laporan keuangan yang lebih akurat dan akuntabel dengan teknologi yang tepat. Keakuratan dan transparansi dalam laporan keuangan merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kepercayaan dan akuntabilitas informasi keuangan yang disajikan kepada publik.

Tanggung jawab untuk laporan keuangan berkualitas tinggi di Indonesia semakin meningkat seiring dengan kemajuan dalam akuntansi dan undang-undang yang melarang keungan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan PP Nomor 2 Tahun 2005 dan menetapkan standar untuk laporan keuangan. Pada peraturan yang dijelaskan sebelumnya bahwa laporan keuangan harus memenuhi karakteristik seperti relevansi, keandalan, kemudahan pemahaman, dan dapat dibandingkan. Jika keempat elemen tersebut dapat terpenuhi, maka pemerintah daerah dinilai telah berhasil menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangannya.

Elemen utama yang mempengaruhi mutu laporan keuangan adalah teknologi informasi, yang memungkinkan pelaksanaan proses keuangan secara relevan dan waktu nyata. Sebagaimana dikemukakan oleh Putra dan Afri (2020) yang dikutip dalam Hendraputra et al. (2021:19), teknologi informasi mencakup berbagai perangkat dan sistem elektronik seperti komputer, aplikasi perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta barcode, yang berfungsi untuk mengolah dan menyampaikan data secara digital. Dalam praktik pemerintahan dan dunia usaha, bagian dalam penerapan teknologi informasi yang penting adalah sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi guna memperkuat sistem informasi manajemen dan alur kerja antarunit, sehingga proses kerja dapat berlangsung secara lebih terintegrasi dan efisien (Ridwan, 2021).

Bagian lain yang dapat dicapai dalam pencapaian kualitas laporan keuangan yang baik yaitu keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 yang mengharuskan sistem informasi keuangan daerah mampu menunjang kegiatan pelaporan serta fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 juga menyatakan bahwa ada mekanisme pengawasan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah baik dan akurat. Dalam penelitian ini, pengawasan keuangan dianalisis melalui dua dimensi, yaitu pengawasan melekat yang berkaitan dengan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan oleh atasan dan bagian pemerintah tertinggi dilakukan oleh pihak internal yang memiliki fungsi pengawasan khusus.

Dalam konteks ini, TI dan Pengawasan dalam keuangan memegang peranan penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pengolahan karya ilmiah ini berfokus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang, yang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dalam hal pajak dan retribusi. Bapenda Kabupaten Sumedang menghadirkan sebuah aplikasi pelayanan dan pengelolaan keuangan berbasis TI diantaranya: (1) SIPPADU (Sistem Pajak Daerah Terpadu), (2) Aplikasi Siapdol, (3) Aplikasi SIM PBB, (4) E-layanan sim PBB., (5) Aplikasi Elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (e-BPHTB).

Hasil observasi dan wawancara dengan Inspektorat terhadap Bapenda mengungkapkan adanya masalah terkait kesalahan pengiriman dokumen yang disebabkan oleh komunikasi yang kurang efektif. Hal ini berpotensi mempengaruhi kualitas laporan keuangan, sehingga pengelolaan laporan menjadi membingungkan. Selain itu, wawancara juga menyoroti kendala teknologi informasi yang sering mengalami gangguan akibat terputusnya koneksi, seperti yang terjadi saat proyek penggalan merusak kabel fiber optic. Gangguan ini menyebabkan data tidak dapat diperbarui secara real-time dan memperlambat konfirmasi bukti keuangan, sehingga laporan keuangan tidak dapat disampaikan tepat waktu. Terakhir, laporan evaluasi SAKIP Bapenda menunjukkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana dalam sistem teknologi informasi yang belum merata juga berkontribusi pada masalah ini, yang mengakibatkan penurunan nilai keandalan laporan keuangan akibat data yang tidak terbaru.

Dari uraian yang telah di paparkan, peneliti merasa tertarik dan ingin meneliti lebih jauh terkait dengan elemen berupa teknologi informasi dan pengawasan keuangan dalam proses penentuan kualitas laporan keuangan, sehingga di ambil judul **“Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Bapenda Kabupaten Sumedang.”**

2. Theoretical Basis

1) Teknologi Informasi

Semua jenis proses yang terlibat dalam pengelolaan informasi dikenal sebagai teknologi informasi. Teknologi ini mencakup pembuatan, pemeliharaan saluran, pemilihan dan pengiriman informasi, penerimaan yang efektif, penyimpanan dan pencarian kembali informasi, dan akhirnya mencapai titik di mana informasi dimanfaatkan (Hendraputra et al., 2021:2). Penggunaan teknologi informasi dalam konteks pemerintahan daerah tidak hanya terbatas pada penggunaan komputer, tetapi juga melibatkan teknologi jaringan yang mendukung penyampaian layanan dan pengelolaan administrasi publik. PP No. 56 Tahun 2005 mengatur mengenai SIKD, yakni sistem layanan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan daerah. Sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dan mengolah data keuangan daerah serta data lain yang relevan, agar dapat disampaikan informasi untuk publik dan dimanfaatkan untuk dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta laporan tanggungjawab pemerintah daerah.

Menurut Hendraputra et al. (2021:12), Komponen teknologi informasi, diantaranya:

- a. Perangkat keras (hardware): Komponen fisik dari sistem komputer erluar yang dapat diraba secara langsung
- b. Perangkat lunak (software): Merupakan kumpulan program atau aplikasi yang dirancang untuk menjalankan instruksi tertentu dalam pengolahan data komputer.
- c. Brainware: Pengguna atau SDM yang terlibat mengoperasikan system computer dan pengelolaanya. Peran manusia sangat penting dalam mendukung kinerja sistem secara keseluruhan.

2) Pengawasan Keuangan

Menurut Erowati (2020:149), pengawasan merupakan serangkaian aktivitas atau tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan agar selalu berada pada tujuan yang di tentukan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan keuangan daerah, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010, adalah proses untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama pengawasan keuangan daerah adalah untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan keuangan publik. Banyak dasar hukum mendukung pengawasan ini. Regulasi yang menjadi dasar hukum bagi pengawasan internal dan eksternal terdiri dari PP No. 79 Tahun 2005 mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern dalam pemerintahan.

Menurut Tata Cara Pengawasan Keuangan Daerah, yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2001, pengawasan adalah proses tindakan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa operasi pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. Menurut Dewi Erowati (2020:155), pengawasan dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan metodenya:

1. Pengawasan Melekat dilakukan secara langsung oleh pimpinan unit atau organisasi terhadap penggunaan seluruh sumber daya yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memantau, memeriksa, dan mengevaluasi proses kerja guna mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan yang dapat dijadikan dasar untuk pengembangan organisasi ke depannya.
2. Pengawasan fungsional merupakan jenis pengaweirksaan oleh pihak yang memiliki tugas khusus dalam pengawasan, baik dari dalam maupun luar instansi pemeirntah. Pengawasan ini bersifat wajib karena sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta berperan penting sebagai pelengkap bagi pengawasan melekat. Tanpa adanya pengawasan fungsional, pelaksanaan pengawasan melekat dianggap tidak akan berjalan secara maksimal.

3) Kualitas Laporan Keuangan

Jika informasinya dapat diandalkan, mudah dipahami, dan membantu pengguna membuat keputusan dengan aman, laporan keuangan akan dinilai dengan baik. Informasi dalam laporan keuangan sebaiknya dianalisis dengan mempertimbangkan data dari periode sebelumnya sebagai bahan perbandingan. LKPD merupakan bentuk pelaporan keuangan di sektor publik yang disusun oleh instansi pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban fiskal (Anto, 2020:59).

Menurut Elsy (2016:49), kualitas laporan keuangan tercermin dari seberapa jelas informasi yang disajikan. Informasi harus dapat dipahami, relevan untuk pengambilan keputusan, dapat diandalkan, dan tidak menyesatkan. Untuk menilai kinerja keuangan secara berkelanjutan, laporan keuangan yang memenuhi kriteria tersebut juga harus dibandingkan dengan laporan dari periode sebelumnya.

3. Research Methodology

Studi ini menggunakan metode kuantitatif. Sugiyono (2022:8) menyatakan bahwa pendekatan ini didasarkan pada positivisme sebagai teori dan biasanya digunakan untuk populasi atau sampel tertentu setelah alat atau instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data, hipotesis diuji secara statistik. Dalam pelaksanaannya, data diperoleh melalui pemberian perlakuan tertentu, seperti penyebaran kuesioner, pelaksanaan tes, atau wawancara terstruktur, meskipun perlakuan tersebut tidak termasuk dalam eksperimen secara langsung. Melalui pendekatan ini, peneliti berharap dapat memperoleh jawaban yang tepat terhadap permasalahan penelitian serta membuktikan kebenaran hipotesis yang telah diajukan.

4. Results and Discussion

1. Uji Validitas dan Uji Reabilitas

A. Uji Validitas Teknologi Informasi (X1)

Setelah data perolehan dari responden kuesioner variabel Teknologi Informasi (X₁) diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan uji validitas terhadap setiap item pernyataan dalam instrumen tersebut. Data yang telah ditabulasi sebelumnya dikonversi ke dalam bentuk angka berdasarkan skala Likert. Uji validitas diproses menggunakan rumus *Pearson Product Moment*, guna mengetahui sejauh mana masing-masing item pernyataan mampu mengukur konstruk variabel yang dimaksud. Hasil dari penghitungan tersebut akan menunjukkan validitas setiap pernyataan indikator.

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Validitas Variabel Teknologi Informasi (X1)

No	Pernyataan	r - Hitung	r - Tabel	P (Sig.)	Keterangan
1	Item 1	0,678	0,244	0,001	Valid
2	Item 2	0,704	0,244	0,001	Valid
3	Item 3	0,588	0,244	0,001	Valid
4	Item 4	0,689	0,244	0,001	Valid
5	Item 5	0,549	0,244	0,001	Valid
6	Item 6	0,711	0,244	0,001	Valid
7	Item 7	0,572	0,244	0,001	Valid
8	Item 8	0,540	0,244	0,001	Valid
9	Item 9	0,704	0,244	0,001	Valid
10	Item 10	0,700	0,244	0,001	Valid
11	Item 11	0,785	0,244	0,001	Valid
12	Item 12	0,675	0,244	0,001	Valid
13	Item 13	0,652	0,244	0,001	Valid
14	Item 14	0,773	0,244	0,001	Valid
15	Item 15	0,693	0,244	0,001	Valid
16	Item 16	0,709	0,244	0,001	Valid

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS 27 (2025).

Semua item pernyataan di baris 1–16 dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung lebih dari 0,244). Oleh karena itu, semua instrumen yang berkaitan dengan variabel TI yang digunakan dalam penelitian di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang dinyatakan valid dan layak untuk digunakan selama proses analisis yang akan datang.

Tabel 3. 2 Reabilitas Teknologi Informasi (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.917	16

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS 27 (2025)

Nilai Cronbach's Alpha untuk variabel Teknologi Informasi adalah 0,917 ditemukan di Tabel 3.2. Nilai ini menunjukkan bahwa alat yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut di Badan Pendapatan

Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang tergolong reliabel, karena melebihi ambang batas yang ditetapkan, yaitu 0,60. Dengan demikian, instrumen dapat dipercaya untuk menghasilkan data yang konsisten.

B. Uji Validitas Pengawasan Keuangan (X2)

Setelah diperoleh distribusi jawaban responden terhadap kuesioner variabel Pengawasan Keuangan (X2), langkah selanjutnya adalah melakukan uji validitas terhadap setiap item pernyataan. Item-item tersebut sebelumnya telah ditabulasi dan dikonversi ke dalam bentuk numerik sesuai dengan skala Likert. Rumus Pearson Product Moment digunakan untuk menguji validitas. Data hasil perhitungan dikumpulkan untuk menunjukkan hubungan antara skor total untuk masing-masing item.

Tabel 3. 3 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Validitas Variabel Pengawasan Keuangan (X2)

No	Pernyataan	r - Hitung	r - Tabel	P (Sig.)	Keterangan
1	Item 1	0,667	0,244	0,001	Valid
2	Item 2	0,610	0,244	0,001	Valid
3	Item 3	0,483	0,244	0,001	Valid
4	Item 4	0,485	0,244	0,001	Valid
5	Item 5	0,787	0,244	0,001	Valid
6	Item 6	0,754	0,244	0,001	Valid
7	Item 7	0,712	0,244	0,001	Valid
8	Item 8	0,719	0,244	0,001	Valid
9	Item 9	0,631	0,244	0,001	Valid
10	Item 10	0,550	0,244	0,001	Valid
11	Item 11	0,709	0,244	0,001	Valid
12	Item 12	0,774	0,244	0,001	Valid
13	Item 13	0,648	0,244	0,001	Valid
14	Item 14	0,723	0,244	0,001	Valid
15	Item 15	0,695	0,244	0,001	Valid
16	Item 16	0,709	0,244	0,001	Valid
17	Item 17	0,690	0,244	0,001	Valid
18	Item 18	0,801	0,244	0,001	Valid
19	Item 19	0,587	0,244	0,001	Valid
20	Item 20	0,304	0,244	0,001	Valid
21	Item 21	0,740	0,244	0,001	Valid

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS 27 (2025).

Hasil perhitungan validitas untuk nomor 1 hingga 21, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.3, adalah valid karena item pernyataan, atau instrumen, penelitian yang dapat diandalkan tentang pengawasan keuangan pada Bapenda Kabupaten Sumedang, memiliki validitas dan legitimasi untuk digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3. 4 Reabilitas Pengawasan Keuangan (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.929	21

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS 27 (2025)

Karena nilai Cronbach's Alpha atas variabel pengawasan keuangan lebih besar dari 0,06, dapat disimpulkan bahwa instrumen pengawasan keuangan pada Bapenda Kabupaten Sumedang adalah reliabel, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3.4 sebelumnya.

C. Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Saat distribusi jawaban responden untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menguji validitas pernyataan-pernyataan yang telah ditabulasi dan diubah menjadi angka sesuai skala likert, dan menggunakan rumus pearson product moment untuk mendapatkan data hasil perhitungan:

Tabel 3. 5 Rekapitulasi hasil Perhitungan Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No	Pernyataan	r - Hitung	r - Tabel	P (Sig.)	Keterangan
1	Item 1	0,733	0,244	0,001	Valid
2	Item 2	0,722	0,244	0,001	Valid
3	Item 3	0,537	0,244	0,001	Valid
4	Item 4	0,682	0,244	0,001	Valid
5	Item 5	0,537	0,244	0,001	Valid
6	Item 6	0,758	0,244	0,001	Valid
7	Item 7	0,809	0,244	0,001	Valid
8	Item 8	0,742	0,244	0,001	Valid
9	Item 9	0,769	0,244	0,001	Valid
10	Item 10	0,734	0,244	0,001	Valid
11	Item 11	0,727	0,244	0,001	Valid

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS 27 (2025).

Menurut tabel 3.5 di atas, hasil perhitungan validitas mo 1 s.d 11 dinyatakan sah, dengan alasan hitungan r-hitung > r-tabel atau lebih besar dari 0.244. Kami menemukan instrumen, atau item pernyataan, yang digunakan untuk melakukan penelitian tentang kualitas laporan keuangan Bapenda Kabupaten Sumedang, sah untuk dipakai dalam penelitian ini.

Tabel 3. 6 Reabilitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.898	11

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 27 (2025)

Seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 3.6 di atas, instrumen kualitas laporan keuangan untuk Bapenda Kabupaten Sumedang dianggap dapat diandalkan jika nilai Cronbach's Alphanya lebih besar dari 0,06.

2. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini, pengujian Kolmogrov-Smirnor digunakan, yang dilakukan sesuai dengan kriteria berikut.

Hasil uji normalitas data dengan SPSS versi 27 ditunjukkan di sini. Angka signifikan (sig) lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa data memiliki distribusi normal, sedangkan angka signifikan kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa data tidak memiliki distribusi normal.

Tabel 3. 7 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual	
N		62	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.70811087	
Most Extreme Differences	Absolute	.092	
	Positive	.092	
	Negative	-.080	
Test Statistic		.092	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.208	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.198
		Upper Bound	.219
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance. e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Sumber : Data diolah oleh SPSS 27 (2025)

Nilai Asymp.Sig (2 tailed) sebesar 0,20 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tingkat signifikan pada variabel penelitian berdistribusi normal, seperti yang ditunjukkan dalam data yang disajikan pada tabel 3.7..

2) Uji Multikolinearitas

Tabel 3. 8 Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Toleranc e	VIF
1	(Constant)	4.451	2.960		1.504	.138		
	TOTAL_ TI	.206	.067	.315	3.071	.003	.337	2.963
	TOTAL_P K	.328	.055	.614	5.995	.000	.337	2.963

a. Dependent Variable: TOTAL_LK

Sumber : Data diolah oleh SPSS 27 (2025)

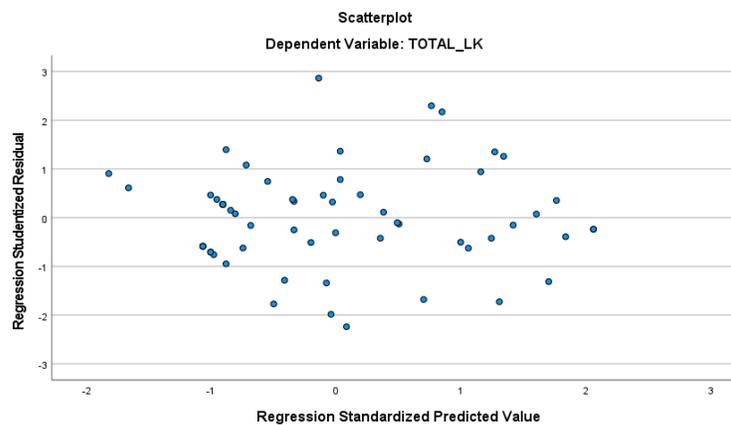
Diproleh perhitungan nilai toleransi, yang ditunjukkan dalam data tabel 3.8, perolehan variabel independen (Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan) memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10, yang menunjukkan bahwa tidak terjadi hubungan antara variabel bebas. Selain itu, jumlah faktor variasi inflasi (VIF) juga kurang dari 10. Oleh karena itu, Ada kesimpulan bahwa regresi penelitian ini tidak menemukan multikolinearitas antar variabel.

3) Uji Heteroskedastisitas

Untuk menentukan perbedaan atau ketidakkonsistenan residual dalam model regresi data maka dilakukan uji heteroskedastisitas. Metode yang ideal harus memiliki kondisi "homoskedastisitas", yaitu varians residualnya seragam. Cara menganalisis hasil uji nilai signifikansi dua ekor lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas; sebaliknya, nilai signifikansi dua ekor kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa ada gejala heteroskedastisitas.

Hasil uji juga dapat dilihat dalam grafik "scatterplot". Jika titik-titik pada grafik menyebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu, maka model bebas dari heteroskedastisitas; namun, jika titik-titik tersebut membentuk pola tertentu, seperti mengerucut atau menyebar secara tidak merata, maka kemungkinan besar model mengalami masalah heteroskedastisitas.

Gambar 4. 1 Hasil Uji Plot



Gambar 3. 1 Hasil Uji Plot

Sumber : Data diolah SPSS 27, (2025)

Sebagai yang ditunjukkan pada diagram, titik yang menyebar dan tidak menyerupai suatu pola. Sehingga dapat diartikan tidak terjadi heteroskedastisitas, dapat digunakan menggunakan regresi dan layak. Dengan kata lain, variasi residual tidak pernah berubah antara pengamatan.

Selain itu, metode Glejser, yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya gejala heteroskedastisitas dengan memeriksa hubungan antara nilai residual dan variabel independen, digunakan untuk memperkuat

pemeriksaan. Jika temuan menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi yang berpengaruh, maka dapat diartikan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

Tabel 3. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.022	1.877		.012	.991
	TOTAL_TI	.027	.043	.143	.642	.523
	TOTAL_PK	-.007	.035	-.043	-.193	.848

a. Dependent Variable: ABS_ress

Sumber: Data diolah oleh SPSS (2025)

Hasil uji heteroskedastisitas, yang disajikan di tabel 3.9, menunjukkan bahwa variabel Pengawasan Keuangan menerima nilai Sig. 0,848 dan variabel Teknologi Informasi menerima nilai Sig. 0,523, yang menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi dengan nilai Sig. lebih dari 0.05.

4) Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = 4.451 + 0.206 (X1) + 0.328 (X2) + e$$

Analisis persamaan regresi linear berganda menghasilkan beberapa hasil berikut:

- konstanta dan koefisien variabel independen menunjukkan angka positif. Ini menunjukkan korelasi yang searah antara faktor-faktor ini dan kualitas laporan keuangan daerah. Ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan akan sebanding dengan kualitas sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah. Berikutnya, variabel teknologi informasi (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,206 yang menunjukkan bahwa dengan asumsi bahwa variabel lain tidak berubah, kualitas laporan keuangan daerah dapat meningkat sebesar 20,6% dengan peningkatan 1% dalam penggunaan teknologi informasi.
- Variabel pengawasan keuangan (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,328, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan sebesar 3,6% akan dihasilkan dari peningkatan 1% dalam pengawasan.

5) Uji Hipotesis

A. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menentukan apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nilai t-tabel, yang sesuai dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebelum pengambilan keputusan, dibandingkan dengan nilai t-hitung dari setiap koefisien regresi.

Tabel 3. 10 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T)

Model	Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.451	2.960		1.504	.138
	TOTAL_TI	.206	.067	.315	3.071	.003
	TOTAL_PK	.328	.055	.614	5.995	.000

a. Dependent Variable: TOTAL_LK

Sumber : Data output SPSS, diolah (2025)

Hipotesis pertama (H1) dapat diterima karena pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan TI secara parsial meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah; nilai t-hitung sebesar 3,071 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 2,391 dan nilai signifikansi sebesar 0,003 kurang dari 0,05, sementara nilai t-tabel sebesar 5,995 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 2,391 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 kembali lebih rendah dari nilai t-tabel sebesar 2,391. Ini menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah lebih baik karena pengawasan..

B. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Pengujian F, yang juga dikenal sebagai pengujian koefisien regresi simultan, bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%). Nilai probabilitas, juga disebut sebagai p-value, digunakan saat membuat keputusan. Hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak jika nilai

p kurang dari 0,05. Jika nilai p lebih dari 0,05, hipotesis H0 diterima, yang menunjukkan bahwa pengaruh simultan terjadi dan bahwa variabel independen tidak mempengaruhi secara bersama-sama variabel dependen.

Tabel 3. 11 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	673.379	2	336.689	111.614	.000 ^b
	Residual	177.976	59	3.017		
	Total	851.355	61			

a. Dependent Variable: TOTAL_LK
b. Predictors: (Constant), TOTAL_PK, TOTAL_TI

Sumber : Data Output SPSS 27, diolah (2025)

Dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, hasil uji F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 111.614 lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 3,153, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3.11. H3 diterima karena teknologi informasi dan pengawasan keuangan memengaruhi laporan keuangan daerah secara bersamaan.

C. Uji Determinasi Uji R²

Tabel 3. 12 Uji Determinasi Uji R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.889 ^a	.791	.784	1.737

a. Predictors: (Constant), TOTAL_PK, TOTAL_TI
b. Dependent Variable: TOTAL_LK

Sumber : Output SPSS Data Primer, diolah(2025)

Ringkasan model regresi dan nilai koefisien determinasi yang disesuaikan disajikan dalam Tabel 3.12. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa TI dan pengawasan keuangan bertanggung jawab atas 79% dari perbedaan kualitas laporan keuangan di Bapenda Kabupaten Sumedang. Nilai R-squared sebesar 0,791, atau 79%, ditemukan. Namun, 21% terakhir dipengaruhi oleh variabel luar yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, kontribusi kedua variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan tetap signifikan, sebesar 78,4 persen, menurut nilai R-squared yang disesuaikan sebesar 0,784 setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel. Ini menunjukkan bahwa model regresi berfungsi dengan baik untuk menjelaskan subjek penelitian.

6) Interpretasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa pelaksanaan teknologi informasi menerima skor rata-rata 4,294 dan masuk dalam kategori "Sangat Baik". Capaian nilai menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi: setiap komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia telah diterapkan secara optimal dan sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Di sisi lain, aspek pengawasan keuangan memperoleh skor 4,281, yang termasuk dalam kategori "Cukup Baik", mengindikasikan bahwa proses pengawasan yang dijalankan tergolong cukup efektif berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Sementara itu, kualitas laporan keuangan mencatat skor 3,010 yang juga dikategorikan "Sangat Baik", Dengan kata lain, laporan keuangan harus konsisten, sebanding, mudah dipahami, dan akurat.

Dengan menggunakan metode Pearson Product Moment, semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel teknologi informasi, pengawasan keuangan, dan kualitas laporan keuangan telah diuji validitasnya. Hasilnya menunjukkan bahwa semua pernyataan valid, dan r hitung melebihi r tabel sebesar 0,244. Ketiga variabel menunjukkan tingkat konsistensi internal yang tinggi, menurut uji reliabilitas Cronbach's Alpha.

Hasil dari pengujian asumsi klasik juga menunjukkan bahwa model regresi adalah alat yang tepat untuk digunakan. Nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200 (di atas 0,05), tidak ada multikolinearitas (nilai toleransi di atas 0,10), dan tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas. Data ini dianggap normal. Hasil menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi penting yang diperlukan untuk analisis tambahan. Persamaan berikut dihasilkan dari analisis regresi linear berganda:

$$Y = 4,451 + 0,206X_1 + 0,328X_2 + e,$$

Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa teknologi informasi (X1) dan pengawasan keuangan (X2) berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan (Y). Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar

0,791 menunjukkan bahwa 79,1% perubahan kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan 20,9% yang tersisa dapat dipengaruhi oleh komponen lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pemeriksaan hipotesis menunjukkan bahwa variabel dependen secara signifikan dipengaruhi secara parsial oleh kedua variabel independen. Hipotesis diterima karena nilai t hitung untuk kedua variabel lebih besar dari t tabel dan memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05. Di sisi lain, hasil uji F mendukung hipotesis karena nilai F tabel lebih besar dari t hitung dan memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05.

Dengan demikian, laporan keuangan Bapenda Kabupaten Sumedang menjadi lebih baik karena pengawasan keuangan dan teknologi informasi. Selain itu, temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Christina Loe Mau et al. (2023), Hermawan Darwis dan Meliana (2020), dan Paulina Bibiana et al. (2023), yang menunjukkan bahwa kedua elemen ini mempengaruhi secara signifikan kualitas laporan keuangan.

5. Conclusion and Suggestions

a. Kesimpulan

1. Uji secara terpisah menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi berdampak pada mutu laporan keuangan Bapenda Kabupaten Sumedang. Uji T mengungkapkan bahwa nilai hitung untuk variabel teknologi informasi adalah 3.071, yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai T tabel 2.391, dan nilai signifikansinya di bawah 0,05 (0,003 kurang dari 0,05). Oleh karena itu, hipotesis H_1 diterima, yang membuktikan bahwa mutu laporan keuangan dipengaruhi oleh teknologi informasi.
2. Uji T secara terpisah menunjukkan bahwa variabel pengawasan keuangan berpengaruh pada mutu laporan keuangan Bapenda Kabupaten Sumedang. Uji T menunjukkan bahwa nilai T hitung untuk variabel ini adalah 5.995, yang lebih besar dibandingkan dengan nilai T tabel 2,391, dan nilai signifikansinya juga di bawah 0,05 (0,000).
3. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor teknologi informasi dan pengawasan keuangan. Hasil uji F menunjukkan bahwa F -hitung sebesar 111.614 lebih besar dari F -tabel sebesar 3,153 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H_3 diterima karena tingkat signifikan kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh penggunaan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan.
4. Kualitas laporan keuangan Bapenda Kabupaten Sumedang dipengaruhi oleh Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan. Hasil uji determinasi Adjusted R -square sebesar 0,784 menunjukkan bahwa faktor ini memengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 78,4 persen. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan Bapenda Kabupaten Sumedang akan lebih besar daripada penurunan kualitas laporan keuangan.

b. Saran

1. Dilihat dari sisi kebijakan dan prosedur pengelolaan teknologi informasi di Bapenda Kabupaten Sumedang sangat sangat baik. Namun masih ada sebagian indikator teknologi informasi harus dilakukan evaluasi berkala dengan pelatihan dan pendampingan secara berkala kepada pegawai mengenai penggunaan dan perawatan aplikasi sistem informasi keuangan, sehingga seluruh staff memiliki kemampuan yang merata dalam mengoperasikan teknologi yang di gunakan.
2. Tingkat koordinasi antara bagian keuangan, IT dan pengawasan, sehingga setiap kendala yang muncul dalam proses penyusunan laporan keuangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan secara kolaboratif. Dibarengi dengan penggunaan teknologi informasi yang memperkuat sistem pengawasan keuangan yang ketat dan rutin, sehingga informasi dan data yang di hasilkan berkualitas dan dapat di pertanggung jawabkan untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan.
3. Studi ini membantu kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang akuntansi dan ekonomi sektor publik. Hasil penelitian memberikan dasar teoretis untuk pengkajian lebih lanjut di bidang ini karena menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan pengawasan keuangan memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

4. Untuk penelitian mendatang, disarankan agar tidak hanya fokus pada indikator teknologi informasi dan pengawasan keuangan, tetapi juga mempertimbangkan indikator lain seperti akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Penambahan indikator ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan akurat.

Bibliography

- Anto, Dr. La Ode. 2020. Akuntansi Keuangan Daerah (Teori, Konsep dan Aplikasi). Kendari: AA-DZ Grafika.
- Atsarina, A., Kurniati, S., Atiningsih, S., Kurniasih, N., Imaningati, S., Kusumaningtyas, M., Sari, I. A., & Izzaty, K. N. (2023). Auditing.
- Alvin A Arens, Randal J. Elder & Mark S. Beasley. 2014. Auditing & Jasa Assurance. PT.Gelora Aksara Pratama
- Ardianto, Rama, and Chermian Eforis. 2019. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Bina Akuntansi* Vol 6, No 1 (Januari): 95-136.
- Arif, Rahman. 2017. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi dan Kejelasan Tujuan Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Artikel Ilmiah UNP*, (Februari).
- Candra, Heru K. 2019. Pengantar Teknologi Informasi. Sleman: Poliban Press.
- Elsye,Dr. Rosmery, Dadang Suwanda, and Umuh Muchidin,. 2016. dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintahan Daerah. Cetakan Pertama ed. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. ISBN : 978-979-450-709-4.
- Eroswati, S.Sos., M.Si, Dr.Dewi. 2020. Tata Kelola Keuangan Pemerintah. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. ISBN : 978-623-7925-14-2.
- Haikal, Muhammad F., and Deasy Mauliana. 2022. "Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik." *Vol 28 No 1 (April 2022)*. p-ISSN: 1410-8399, e-ISSN: 2615-3424.
- Hendraputra, Surya, Janner Simartama, Fatimah N. Arifah, Yo C. Giap, Sabrina A. Rahmah, Herlinah, Zelvi Gustiana, et al. 2021. Pengantar Teknologi dan Informasi. cetakan 1 ed. N.p.: Yayasan Kita Menulis. ISBN : 978-623-342-306-9.
- Karim, Abdul, Budianto Bangun, Kusmanto, iwan Purnama, Syaiful Z. Harahap, Deci Irmayani, marnis Nasution, Musthafa H. Munandar, Rahmadani, and Ibnu R. Munthe. 2020. Pengantar Teknologi Informasi. N.p.: Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang.
- Luqyana, and Islahuddin. 2022. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah : Apakah Aksesibilitas, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Aparatur Mempengaruhinya." *jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol 7 No 1 (Februari): 83-94. E-ISSN 2581-1002.
- Loe Mau, Cristina, Yolinda Y. Sobay, Rere P. Bibiana, M.E. Perseveranda, Henny A. Manafe, and Stannis Man. 2022. "Pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi, Pengawasan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu." *JMPIS Jurnal manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol. 4, No.1 (Februari): 289-299. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1>.
- Majid, Jamaluddin. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Sulawesi Selatan: CV.Berkah Utami.
- Moenek, M.Devt.M, Dr.Drs. Reydonnyzar, Dr. H Dadang Suwanda, and H.Basuki Rachmat,. 2020. Dasar- Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Ovil Ridwan Ridwan, Edwin Bustami, Vivi Herlina. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kerinci)." *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa(JAN Maha)*, 2021: 4-30.
- Prof.Dr.Mardiasmo,. 2018. Akuntansi Sektor publik. Edisi terbaru ed. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Prof.Dr. Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Edisi 2 ed. Bandung: CV. ALFABETA.
- Purwati, Ari, Wildoms Sahulilawane, Lia D. Yanti, Yunia Oktari, Lilis Setyanowati, Ikhyanuddin, Sugianto, et al. 2023. Akuntansi Sektor Publik. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Santika, Dewi, Rizky Ridwan, Paskanova C. Gainau, , Dr.Widhy Setyowati, Eliza Arshandy, Dr. Rida P. Sari, Assoc.Prof. Hantono, et al. 2024. Akuntansi Sektor Publik. Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara.
- Sarsiti. 2022. Akuntansi Sektor Publik. Cirebon: CV. Green Publisher Indonesia.
- Yusra, S.E., M.Si, Muhammad. 2016. Sektor Publik. lhokseumawe: Universitas Malikussaleh.
- Yusuf, Marwah. 2021. "Dampak Teknologi Informasi dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah." *AkMen e-jurnal stie nobel - Indonesia Vol 18 No 1 (April): 55-70*. Homepage : <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen>.

Lampiran Peraturan

- Presiden RI. (2004). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan*. 2–6.
- Presiden RI. (2001). *Keputusan Presiden Republik Indonesia No 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Negeri, M. D. (2007). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. *Ятыатат, вы12у(235)*, 245.
- Muara, B. (2023). *Peraturan Bupati Muara Enim no 15 Tahun 2023 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Dalam, M., & Republik, N. (2018). *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL*.
- Permendagri. (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. *Kebijakan Akuntansi, 2013*, 1–8.
- Fitriana, R. (2014). PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. 1–17.
- RI, P. (2008). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2010009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II*. 1–7.
- Presiden RI. (2008). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH*

RI, P. (2010). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH., 88–100.

Presiden RI. (2005). UU No. 56 Tahun 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH. *Sistem Informasi Keuangan Daerah*, 14, 1–20. www.bphn.go.id

RI, P. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. 14, 1–20.

Presiden RI. (n.d.). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH*.

Akuntansi, D. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.